



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 180/35/ 2024

TENTANG
PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ACEH
TENGGARA TAHUN 2024
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ditetapkan berdasarkan usulan OPD/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana termasuk dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Kepala OPD/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tenggara, agar segera mempersiapkan Draft Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, serta dapat melibatkan Tenaga Ahli/unsur terkait lainnya jika dipandang perlu;
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan /mekanisme pembentukan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Februari 2024



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala OPD Kab. Aceh Tenggara;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 180/35 /2024

TANGGAL : 02 Februari 2024

PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2024.

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	PELAKSANAAN	KET
			RUTIN	REVISI	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BKPSDM	Standar Kompetensi Jabatan			√	Permen PAN & RB No.53 Tahun 2020	2024	
2	BKPSDM	Pedoman Manajemen Talenta			√	Permen PAN & RB No 3 Tahun 2020	2024	
3	BKPSDM	Sistem Pola Karier PNS			√	Peraturan Menteri PANRB No.22 Tahun 2021	2024	
4	BKPSDM	Tata cara pemenuhan kebutuhan pegawai secara terbuka dan kompetitif dari jalur CPNS, PPPK, dan PNS dari instansi lain			√	UU No.5 Tahun 2014	2024	
5	BKPSDM	Mutasi			√	Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.5 Tahun 2019	2024	
6	BKPSDM	Tata cara promosi dan mutasi melalui talent pool dan rencana suksesi			√	Permendagri No.58 Tahun 2019	2024	
7	BKPSDM	Perlindungan dan Pelayanan bagi ASN			√	Permen pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.40 Tahun 2018	2024	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ACEH TENGGARA	Program Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama			√	Keputusan Mendikbudristek No.56/M/2022	2024	
9	BPKD	Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah			√	Permendagri No.77 Tahun 2020	2024	
10	BPKD	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			√	Permendagri No.77 Tahun 2020	2024	
11	BPKD	Analisa Standar Belanja			√	Permendagri No.77 Tahun 2020	2024	

12	ASET	Pengelolaan Barang milik Daerah			√	Permendagri No. 47 Tahun 2021	2024	
13	BPKD	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.			√	Permendagri No. 62 Tahun 2017	2024	
14	BAPPEDA	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026			√	UU No. 13 Tahun 2011	2024	
15	BAPPEDA	Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara			√	PP No. 38 Tahun 2017	2024	
16	PERTANIAN	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.			√	UU No. 41 Tahun 2009	2024	
17	DINAS PERKIMTAN	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara			√	No. 25 Tahun 2021	2024	
18	DINAS PUPR	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara.			√	No. 25 Tahun 2021	2024	
19	ORGANISASI	Penyesuaian Sistem Kerja Pasca Penyederhanan Birokrasi			√	Peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2022	2024	
20	P2TSP	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021	2024	
21	TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB ACEH TENGGARA	Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengulu			√	Qanun Aceh Tenggara No. 22 Tahun 2010	2024	
22	TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB ACEH TENGGARA	Perangkat Kute			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Tahun 2017	2024	
23	ORGANISASI	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021	2024	
24	ORGANISASI	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021	2024	

		Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara						
25	ORGANISASI	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021	2024	
26	ORGANISASI	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021	2024	
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik, Wadah Dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik			√	Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012	2024	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah			√	Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012	2024	
29	DISKOMINFO ACEH TENGGARA	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah			√	Pasal 42 Ayat (1) Nomor 71 Tahun 2019	2024	
30	BAPPEDA	RKPK Tahun 2025	√			Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2024	
31	BAPPEDA	RENJA OPD 2025			√	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	2024	
32	BAPPEDA	RKPK Perubahan Nomor 17 Tahun 2024		√		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2024	
33	KEUANGAN	Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024			√	Pasal 4 Ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2029	2024	
34	KB	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.			√	Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
35	KOPERASI	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,			√	Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	

		Fungsi dan tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.						
36	DINKES	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
37	PERTANIAN	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
38	BPKD	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
39	DISPERINDAG	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
40	KOMINFO	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
41	DIKBUD	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
42	PANGAN	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
43	LINGKUNGAN HIDUP	Peraturan Bupati Aceh Tenggara ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
44	PERIZINAN	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	

		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.						
45	PERIZINAN	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ter Integrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.		√		Permendagri No. 17 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2).	2024	
46	KOMINFO	Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Di Kabupaten Aceh Tenggara			√	Perpres No.95 Tahun 2018	2024	
47	BPJS KETENAGAKERJAAN	Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Social Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit			√	Pasal 16 Permenkeu No. 91 Tahun 2023	2024	

